



**Universitas Katolik Parahyangan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Hubungan Internasional Program  
Sarjana**

*Terakreditasi Unggul*

*SK BAN-PT No. 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

**Peran Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik dalam  
Diplomasi Budaya Indonesia terhadap Malaysia untuk  
Menangani Permasalahan Perubahan Iklim**

Skripsi

Oleh

Cinantlya Pragnya Nyasa Dewi

6091901099

Bandung

2022



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana**

*Terakreditasi Unggul*

*SK BAN-PT No. 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

**Peran Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik dalam Diplomasi  
Budaya Indonesia terhadap Malaysia untuk Menangani  
Permasalahan Perubahan Iklim**

Skripsi

Oleh

Cinantya Pragnya Nyasa Dewi

6091901099

Pembimbing

Jessica Martha, S.IP., M.I.Pol.

Bandung

2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Hubungan Internasional  
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Cinantya Pragnya Nyasa Dewi  
Nomor Pokok : 6091901099  
Judul : Peran Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik dalam Diplomasi Budaya Indonesia terhadap Malaysia untuk Menangani Permasalahan Perubahan Iklim

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Kamis, 5 Januari 2023  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**

Marshell Adi Putra, S.IP., MA.

: 

**Sekretaris**

Jessica Martha, S.IP., M.I.Pol.

: 

**Anggota**

Anggia Valerisha, S.IP., M.Si.

: 

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cinantya Pragnya Nyasa Dewi  
NPM : 6091901099  
Jurusan/Program Studi : Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana  
Judul : Peran Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik dalam Diplomasi Budaya Indonesia terhadap Malaysia untuk Menangani Permasalahan Perubahan Iklim

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai aturan yang berlaku, apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 14 Desember 2022



Cinantya Pragnya Nyasa Dewi

## ABSTRAK

Nama : Cinantya Pragnya Nyasa Dewi  
NPM : 6091901099  
Judul : Peran Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik dalam  
Diplomasi Budaya Indonesia terhadap Malaysia untuk Menangani Permasalahan  
Perubahan Iklim

---

Penelitian ini membahas peran aktor non-pemerintah dalam menangani permasalahan perubahan iklim. Penanganan permasalahan perubahan iklim selayaknya dilakukan oleh pemerintah. Hanya saja, pemerintah di kawasan Kalimantan Barat sendiri dalam hal ini tidak berperan secara signifikan sehingga memerlukan kehadiran masyarakat Dayak Iban Sungai Utik yang terlibat lebih banyak dalam menangani permasalahan perubahan iklim. Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti membuat pertanyaan penelitian berupa “Bagaimana peran Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik dalam menangani permasalahan perubahan iklim terhadap Malaysia?”. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti menggunakan Teori Hijau, Diplomasi Budaya, dan Diplomasi *Multistakeholder* dengan metode penelitian kualitatif melalui studi literatur dengan studi kasus tunggal. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat Dayak Iban Sungai Utik berperan sebagai pendukung upaya pencegahan perubahan iklim terutama dalam isu kabut asap lintas batas melalui melalui lokakarya, pelatihan kebudayaan, konferensi, dan publikasi budaya serta merupakan aset Indonesia dalam melakukan diplomasi budaya melalui perannya dalam penjagaan kelestarian alam atas nilai adat yang dimiliki. Dalam penelitian ini pula, penulis melihat penemuan menarik lainnya yaitu masyarakat Dayak Iban Sungai Utik mendukung tugas pemerintah dalam menangani permasalahan perubahan iklim terhadap Malaysia.

Kata Kunci : Perubahan Iklim, Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik, Diplomasi Budaya, Indonesia, Malaysia

## ABSTRACT

Name : Cinantya Pragnya Nyasa Dewi  
Student Number : 6091901099  
Title : The Role of the Dayak Iban Sungai Utik Community in Indonesian Cultural Diplomacy to Malaysia to Handle Climate Change Problems

---

This study discusses the role of non-governmental actors in addressing climate change issues. Addressing climate change issues should be done by the government. However, the government in the West Kalimantan region itself in this case does not play a significant role so that it requires the presence of the Dayak Iban Sungai Utik cultural community who are more involved in dealing with climate change issues. Based on this statement, the researcher made a research question in the form of “How is the role of the Dayak Iban community of Sungai Utik in dealing with climate change issues to Malaysia?”. To answer these questions, researchers use Green Theory, Cultural Diplomacy, and Multistakeholder Diplomacy with qualitative research methods through literature studies with a single case study. Based on the research that has been done, the researcher concluded that the Dayak Iban Sungai Utik cultural community acts as a supporter of efforts to prevent climate change, especially in the issue of transboundary smog through workshops, cultural training, conferences, and cultural publications and is an asset of Indonesia in conducting cultural diplomacy through its role in preserving nature through its customary values. In this study, the authors see other interesting findings, namely the Dayak Iban Sungai Utik cultural community has a greater role than the government in dealing with climate change issues to Malaysia.

Keywords: Climate Change, Dayak Iban Sungai Utik Cultural Community, Cultural Diplomacy, Indonesia, Malaysia

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa melalui kesempatan yang telah diberikan kami dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik sebagai syarat kelulusan Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.

Penelitian yang berjudul “Peran Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik dalam Diplomasi Budaya untuk Menangani Permasalahan Perubahan Iklim” ini secara spesifik menganalisis mengenai bagaimana peran masyarakat Dayak Iban Sungai Utik dalam menangani permasalahan perubahan iklim melalui diplomasi budaya yang dilakukan — lokakarya, pelatihan kebudayaan, konferensi, dan publikasi budaya.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembaca untuk melihat bagaimana masyarakat Dayak Iban Sungai Utik menjadi aset penting bagi Indonesia dalam melakukan diplomasi budaya dan dapat memperluas wawasan pembaca mengenai isu perubahan iklim. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi gambaran atau motivasi kepada pembaca sebagai bahan referensi dalam penentuan juga penyusunan penelitian selanjutnya.

Saya menyadari akan kekurangan dari penulisan laporan pertanggungjawaban ini baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Atas dasar tersebut, saya berharap pembaca dapat memberikan kritik atau saran yang bermakna demi kesempurnaan penelitian ini. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah ikut membantu dan mendukung dalam penelitian demi meminimalisir adanya hambatan yang terjadi.

Bandung, 14 Desember 2022

Penulis

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas bimbingan dan kehendak-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa saya ucapkan juga terima kasih pada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung saya selama proses penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk yang selalu mendukung dan mendoakan setiap langkah kecil saya, Bapak Agustinus Supriono dan Ibu Jazzy. Terima kasih sudah selalu menemani anak kecilnya, atas bantuan moral sampai dengan finansial, untuk terus berusaha memberikan segala yang terbaik.
2. Mba Jessica Martha, S.IP., M.I.Pol. yang telah memberikan arahan dan kesabaran dan meluangkan waktu selama proses pengerjaan skripsi ini. Tanpa Mba Jess, sepertinya mustahil ini selesai.
3. Untuk yang menemani selama masa pengerjaan skripsi, Iyan Markus Tulus Panjaitan. Terima kasih sudah hadir dan melihat aku menangis sampai akhirnya ada di titik ini.
4. Untuk yang selalu memberikan tawa, Elisa Marchelina, Dolorosa Raras, Asha Handria, Magda Zefanya. Terima kasih sudah memberikan canda di setiap keluh kesahku.
5. Untuk yang menemani aku tidur setiap hari, Carlotta Concetta. Terima kasih sudah mau direpotkan setiap hari dengan aku yang tidak pernah bisa diam.
6. Faustina Auria dan Gabriella Bagetusta Sitepu, terima kasih banyak untuk semua *deep talk* yang telah kita lalui sebagai salah empat wanita diantara pria-pria kontrakan.
7. Adito Palendra Rusdianto, Tito Samuel Sihombing, Ary Saputra, Sakti Boy Sihombing, Patar Silalahi, dan Calvin Imanda. Selamat ya, salah satunya sudah ditetapkan sebagai pemenang Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) periode 2023 oleh aku. Terima kasih semua, maaf aku gengsi.
8. Untuk teman-temanku yang *always stay in positive vibes*, Hasya Arrumaisha, Fidela Divani, Alexandra Anggita, Ivana Budiani Oetomo dan Adjie Laksmana, maaf ya Djie telat kadonya.

9. Ternyata kita melangkah bersama dari bayi sampai sekarang, terima kasih Ignacio Fino Kiwa dan Yohanes Don Bosco Pranajaya.
10. Untuk semua rekan dan saudara yang tidak dapat daya sebutkan satu-persatu disini, terima kasih atas segalanya.

## DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRAK .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRACT .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vii
DAFTAR AKRONIM.....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.2 Identifikasi Masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.2.1 Pembatasan Masalah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.2.2 Rumusan Masalah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.4 Tinjauan Pustaka .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.5 Kerangka Teori.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.6.1 Metode Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.7 Sistematika Pembahasan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB II URGENSI PENCEGAHAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DAN HAMBATANNYA .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2 Perubahan Iklim Sebagai Ancaman Hubungan Indonesia dan Malaysia .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2.1 Potensi Bencana Alam .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2.2 Migrasi Internasional .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2.3 Ketahanan Pangan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.3 Diplomasi Budaya Sebagai Upaya Pencegahan Perubahan Iklim .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

2.4 Hambatan dan Tanggapan Mengenai Isu Perubahan Iklim.....	<b>Error!</b>
<b>Bookmark not defined.</b>	
2.4.1 Hambatan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.4.2 Tanggapan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB III PERAN MASYARAKAT DAYAK IBAN SUNGAI UTIK DALAM PERMASALAHAN PERUBAHAN IKLIM.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.1 Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Menangani Permasalahan Perubahan Iklim terhadap Malaysia .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2 Peran Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik Sebagai Kekuatan Baru dalam Menangani Permasalahan Perubahan Iklim Melalui Diplomasi Budaya...	<b>Error!</b>
<b>Bookmark not defined.</b>	
3.2.1 Memberikan Pendekatan dari Skala Terkecil .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2.2 Memberikan Wawasan atau Edukasi Mengenai Penjagaan Lingkungan Hidup .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2.3 Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Mengenai Isu Perubahan Iklim melalui Bantuan Organisasi Internasional .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2.4 Meningkatkan Citra Indonesia dalam Isu Perubahan Iklim.....	<b>Error!</b>
<b>Bookmark not defined.</b>	
<b>BAB IV KESIMPULAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Emisi CO <sub>2</sub> dari Pembakaran Bahan Bakar dan Emisi Gas Rumah Kaca dari LULUCF.....	32
Gambar 2.2 Emisi CO <sub>2</sub> Sektoral dari Pembakaran Bahan Bakar.....	34
Gambar 2.3 Skema Dampak Perubahan Iklim Terhadap Ketahanan Pangan.....	40
Gambar 2.4 Bagan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs).....	42
Gambar 2.5 Rancangan Strategis Direktorat Diplomasi Publik.....	55

## DAFTAR AKRONIM

ADB	<i>Asian Development Bank</i>
AMAN	Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
BIFF	<i>Bali International Indigenous Film Festival</i>
CO2	Gas Karbondioksida
CSO	<i>Civil Society Organization</i>
FWI	<i>Forest Watch Indonesia</i>
GDP	<i>Growth Domestic Product</i>
HAM	Hak Asasi Manusia
HTI	Hutan Tanaman Industri
IGO	<i>International Governmental Organizations</i>
IMF	<i>International Monetary Fund</i>
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KLHS	Kajian Lingkungan Hidup Strategis
LEI	Lembaga Ekolabel Indonesia
LULUCF	<i>Land Use, Land-Use Change and Forestry</i>
NDC	Komitmen Kontribusi Nasional

NDPE	<i>No Deforestation No Peat Exploitation</i>
NGO	<i>Non-Governmental Organization</i>
MoU	<i>Memorandum of Understanding</i>
MSC	<i>Ministerial Steering Committee</i>
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PHL	Pengelolaan Hutan Lestari
PPSDAK	Pemberdayaan Pengelolaan Sumber Daya Alam Kerakyatan
PPSHK	Program Pemberdayaan Sistem Hutan Kerakyatan
LBBT	Lembaga Bela Banua Talino
SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i>
TWG	<i>Technical Working Group</i>
UN-CERD	Penghapusan Diskriminasi Rasial
UNDP	<i>United Nations Development Programme</i>
WRI	<i>World Resources Institute</i>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Isu perubahan iklim merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, isu perubahan telah menyentuh sampai dengan lingkup terkecil — suku. Di Kalimantan, masyarakat Budaya Dayak menjadi kelompok etnis terbesar dengan total terdapat 405 sub-etnis di mana Iban menjadi yang terbesar. Setiap komunitas adat seyogyanya memiliki hutan yang dilindungi dan dikelola atas dasar hukum budaya setempat. Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik sendiri telah memahami sistem pengelolaan berkelanjutan demi mempertahankan sumber daya alam, terutama yang berasal dari hutan untuk generasi-generasi selanjutnya. Kabupaten Kapuas Hulu sendiri telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi dalam Peraturan Daerah Kapuas Hulu Nomor 20 Tahun 2015. Lebih dari 57% bagiannya pun memiliki peran penting sebagai *reservoir* atau penampungan air bersih juga sumber air untuk sungai di Kalimantan. Hutan adat Sungai Utik dalam hal ini terletak di antara Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum yang berada dalam Lanskap Kapuas Hulu.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sandy Leo et al., "Indigenous Dayak Iban Customary Perspective on Sustainable Forest Management, West Kalimantan, Indonesia," *Biodiversitas Journal of Biological Diversity* 23, no. 1 (January, 5 2022) <https://smujo.id/biodiv/article/view/9928/5452>.

Maka dari itu, hutan adat Sungai Utik sangat memegang peranan penting dalam kelestarian alam. Hanya saja, permasalahan perubahan iklim tidak hanya berdampak terhadap lingkungan saja, tetapi juga memiliki pengaruh terhadap kelangsungan hidup masyarakat disekitarnya. Marginalisasi ekonomi juga politik, hilangnya lahan, sumber daya, sampai kepada diskriminasi membuat masyarakat adat pun seringkali menjadikan komunitas sosial yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Hal ini membuat mereka perlu beradaptasi serta mencari cara untuk bagaimana mengatasi atau meminimalisir dampak tersebut. Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Barat, Sujarni Alloy mengatakan bahwa kawasan Sungai Utik telah menjadi benteng hutan alam terakhir di provinsi tersebut.<sup>2</sup> 20 Mei 2020 silam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akhirnya mengakui adanya hutan adat milik masyarakat Suku Dayak Iban Sungai Utik dalam Surat Keterangan Nomor 3238/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/5/2020 yang membagi adanya hutan lindung seluas 3.862 hektar, hutan produksi terbatas seluas 5.518 hektar, dan untuk fungsional lainnya seluas 100 hektar.<sup>3</sup>

Sejak 130 tahun lalu, masyarakat Suku Dayak Iban selalu menjunjung tinggi adanya adat istiadat dalam melestarikan hutan. Menurut mereka, melalui prinsipnya yang bertajuk 'the forest is our father, the earth is our mother, and the water is our

---

<sup>2</sup> "Dayak Iban Penjaga Hutan Kapuas Hulu," BBC News Indonesia, June 10, 2010, [https://www.bbc.com/indonesia/laporan\\_khusus/2010/06/100610\\_hutandayak](https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2010/06/100610_hutandayak).

<sup>3</sup> Aseanty Pahlevi, "Hutan Adat Masyarakat Iban Sungai Utik Kini Diakui Negara," Mongabay, July 18, 2020, <https://www.mongabay.co.id/2020/07/18/hutan-adat-masyarakat-iban-sungai-utik-kini-diakui-negara/>.

blood', masyarakat Suku Dayak Iban dapat menjaga keberlangsungan alam disekitarnya. Sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Suku Dayak Iban untuk mengenal dan memberikan edukasi mengenai hutan sejak usia dini demi menimbulkan rasa kepemilikan terhadap alam juga lingkungan. Dalam adat yang dianutnya pun, masyarakat Suku Dayak Iban Sungai Utik dibiarkan untuk melakukan eksplorasi terhadap hutan dan mengajarkan kearifan, adat istiadat dalam menjaga hutan, dan memahaminya melalui ritual, nyanyian, serta tarian adat. Perubahan iklim sendiri terjadi pada pola cuaca dimana hal tersebut kemudian menentukan suatu atmosfer baik dalam ranah lokal, regional, maupun global. Perubahan yang terjadi ini memiliki berbagai efek yang dapat diamati atau dapat dikatakan identik. Perubahan iklim mulai terasa sejak awal abad ke-20 akibat beberapa aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil yang mengakibatkan meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida (CO<sub>2</sub>).<sup>4</sup>

Aktivitas yang tanpa kita sadari dapat membahayakan bumi tersebut meningkatkan tingkat gas rumah kaca yang dapat menyerap daya panas pada atmosfer bumi dan menyebabkan peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi — pemanasan global. Tidak hanya atas perilaku manusia, proses alami yang terjadi juga dapat menyebabkan terjadinya perubahan iklim, seperti variabilitas internal atau pola siklus lautan maupun eksternal atau aktivitas vulkanik, variasi orbit bumi, dan juga perubahan output energi pada matahari. Catatan data iklim

---

<sup>4</sup> “Indigenous Climate Change Solutions,” If Not Us Then Who?, n.d., <https://ifnotusthenwho.me/films/indigenous-climate-change-solutions/>.

memperlihatkan bahwa indikator utama terjadinya perubahan iklim adalah peningkatan suhu daratan dan lautan global, naiknya permukaan laut, meleburnya es di kutub bumi, frekuensi perubahan cuaca ekstrim, dan perubahan terhadap awan juga tutupan vegetasi<sup>5</sup>. Terhitung hanya dalam 650.000 tahun terakhir telah terjadi 7 (tujuh) siklus yang terjadi dalam glasial baik itu kemajuan maupun penyusutan dan mengakibatkan es terakhir pada 11.700 tahun lalu menandakan dimulainya era iklim modern dan juga peradaban manusia. Karbon dioksida dari aktivitas yang dilakukan manusia meningkat lebih dari 250 kali lebih cepat dan mengakibatkan adanya efek gas rumah kaca.<sup>6</sup>

Dalam sebuah laporan panel antar pemerintah mengenai perubahan iklim, 1.300 ahli ilmiah dunia di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menjelaskan bahwa setidaknya terdapat 95% kontribusi dari aktivitas manusia selama 50 tahun terakhir ini dalam perubahan iklim.<sup>7</sup> Semakin berkembangnya zaman dalam memasuki era globalisasi, membuat isu lingkungan semakin menjadi kajian yang harus diutamakan. PBB bersama dengan ini telah merubah aspek isu keamanannya tidak hanya memberikan pembahasan mengenai konflik ataupun perang, tetapi juga melakukan tinjauan lebih dalam terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Hanya saja, kesadaran baik masyarakat maupun pemerintah

---

<sup>5</sup> “Overview: Weather, Global Warming and Climate Change,” Climate Change: Vital Signs of the Planet (NASA, April 29, 2021), <https://climate.nasa.gov/resources/global-warming-vs-climate-change/>.

<sup>6</sup> “Climate Change Evidence: How Do We Know?,” Climate Change: Vital Signs of the Planet (NASA, September 21, 2018), <https://climate.nasa.gov/evidence/>.

<sup>7</sup> “The Causes of Climate Change,” Climate Change: Vital Signs of the Planet (NASA, 2018), <https://climate.nasa.gov/causes/>.

yang belum terbentuk masih dapat dikatakan sulit untuk menjadi penyelesaian dalam permasalahan ini. Tidak hanya itu, kurangnya peran aktor non-negara dalam keterlibatan pemeliharaan perdamaian pun menghambat proses dari adanya pembaharuan isu keamanan itu sendiri. Oleh karena itu, PBB sampai saat ini masih berada dalam tahap pencarian jalan tengah demi tetap menjaga perdamaian dalam ranah dunia politik internasional. Dengan kata lain, pembaharuan yang dilakukan memerlukan adanya kondisi yang tepat, kelembagaan yang efektif tersedia, dan kerja keras diplomatik yang berkelanjutan.<sup>8</sup>

Meski perubahan iklim yang sedang terjadi memiliki fase perubahan dan efek yang berbeda, namun permasalahan ini perlu adanya tindak lanjut bersama oleh seluruh negara. Hal tersebut dilakukan mengingat isu perubahan iklim sangat rentan untuk berpengaruh satu sama lain dalam waktu yang cukup signifikan. Asia Tenggara sendiri telah mengalami kenaikan suhu rata-rata berkelanjutan sejak tahun 1960 di setiap dekadanya sehingga dampak yang ditimbulkan cukup membahayakan negara-negara didalamnya. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki resiko tinggi dari dampak perubahan iklim berupa kenaikan permukaan air laut, gelombang panas, peningkatan curah hujan, dan kekeringan. Hal tersebut diakibatkan mengingat Indonesia memiliki jumlah penduduk yang cukup padat, tingginya tingkat keanekaragaman hayati, luasnya garis pantai juga banyaknya pulau yang saling bergantung dengan curah hujan berkaitan dengan produksi kebutuhan masyarakat. Maka dari itu, Benjamin P. Horton selaku direktur

---

<sup>8</sup> Karns Margaret, *International Organizations : The Politics and Processes of Global Governance*, 3rd ed. (Lynne Rienner Publishers, 2015), 573–92.

Observatorium Bumi Singapura di Nanyang Technological University mengatakan bahwa kenaikan permukaan laut yang terjadi di masa mendatang pastinya mempengaruhi infrastruktur, ekonomi, dan populasi.

ISEAS-Yusof Ishak Institute pun dalam surveynya membuktikan bahwa masyarakat menganggap dampak paling serius dari perubahan iklim adalah peningkatan curah hujan yang kemudian mengarah kepada bencana banjir. Dampak tersebut tentu saja sangat terasa bagi mereka yang tinggal di daerah rawan banjir, longsor, dan kekeringan. Dampak yang terjadi pun tidak lepas dari aspek kesehatan yang dapat meningkatkan potensi penyebaran penyakit lebih cepat dan juga terkontaminasinya air bersih. Pertemuan KTT ASEAN berulang kali mengidentifikasi perubahan iklim sebagai sebuah tantangan regional akibat tindakannya yang masih dapat dikatakan kurang. Maka dari itu, tidak hanya beradaptasi dengan perubahan iklim, negara anggota ASEAN juga perlu untuk melakukan perubahan strategi dalam pembangunan yang memperburuk pemanasan global.<sup>9</sup> Permasalahan perubahan iklim yang berdampak pada sektor pertanian, pariwisata dan perikanan ini juga dapat menghancurkan ekonomi negara. *Asian Development Bank* (ADB) dilansir dari *International Monetary Fund* (IMF) pada tahun 2015 silam memperkirakan bahwasannya negara-negara anggota ASEAN mengalami kerugian sekitar 11% dari Growth Domestic Product (GDP) kawasan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Deutsche Welle, "Are Southeast Asian Nations Meeting Their Climate Commitments? | DW | 30.10.2021," DW, October 30, 2021, <https://www.dw.com/en/are-southeast-asian-nations-meeting-their-climate-commitments/a-59637765#:~:text=Southeast%20Asia%20is%20among%20the>.

<sup>10</sup> Amit Prakash, "The Impact of Climate Change in Southeast Asia – IMF Finance & Development Magazine | September 2018," IMF, 2018,

Pasalnya, dampak perubahan yang terjadi dalam hal ini berpengaruh terhadap produksi bahan baku konsumsi masyarakat dalam aspek pertanian dan pangan akibat berkurangnya penguapan, curah hujan, kelembaban juga kesuburan tanah dan air.<sup>11</sup>

Hal tersebut kemudian menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan, adanya ketimpangan antar kelas. Jika dilihat, Indonesia menjadi negara dengan penghasil emisi gas rumah kaca terbesar kedelapan di dunia akibat ketergantungannya pada batu bara dan bahan bakar fosil lainnya. Deforestasi yang terjadi di Indonesia untuk produksi pulp, kertas, dan minyak kelapa sawit yang notabene merupakan sumber pendapatan ekspor terbesar pun menjadi akar dari terjadinya gas rumah kaca. Tidak hanya itu, saat ini, Malaysia pun menjadi negara ke-26 penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia dimana posisi ini berada jauh di bawah Indonesia. Atas dasar tersebut, Indonesia dan Malaysia telah mengesahkan undang-undang dan kebijakan pengurangan bahan bakar fosil demi menangani permasalahan perubahan iklim ini dan tindak lanjut dari Paris Agreement 2015. Maka dalam laporan *impact of climate change on ASEAN Internasional Affairs* pun dengan ini menyoroti hubungan antar negara sehingga dengan ini terciptanya Komitmen Kontribusi Nasional (NDC) yang tertuang dalam *ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance* sebagai salah satu solusi dalam menghadapi dampak

---

<https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2018/09/southeast-asia-climate-change-and-greenhouse-gas-emissions-prakash.htm>.

<sup>11</sup> “Hope: Indonesia’s Dayak Iban Indigenous Climate Change Solutions Country Indonesia,” 2015, <https://simaclassroom.com/wp-content/uploads/2017/04/Indigenous-Climate-Change-Solutions-Hope-Educational-Pack-If-Not-Us-Then-Who-v2.pdf>.

perubahan iklim. Namun, penetapan kebijakan tersebut seringkali bertentangan dengan kepentingan subsidi biaya produk minyak bumi dan listrik untuk kebutuhan masyarakat.<sup>12</sup>

Maka dari itu, komunitas lokal dan pribumi dalam hal ini menjadi salah satu aktor yang dapat membantu dalam penyelesaian masalah perubahan iklim dalam membangun keberlanjutan yang inovatif dan bekerja untuk manusia juga alam. Maka dari itu, perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam membangun kesadaran untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim dengan tetap melihat setiap aspek yang ada, termasuk kebutuhan masyarakat. Dalam menangani permasalahan perubahan iklim, peran masyarakat adat dapat dikatakan memiliki pengaruh signifikansi atau cukup besar karena keberadaannya yang notabene bersentuhan langsung dengan alam. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 922 pulau berpenghuni, salah satunya adalah Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan memiliki 3 (tiga) bagian wilayah yaitu Malaysia, Brunei, dan juga 73% diantaranya adalah Indonesia. Pulau Kalimantan memiliki salah satu hutan hujan tertua di dunia sehingga patut untuk dijaga oleh masyarakatnya.<sup>13</sup> Malaysia menjadi negara yang berbatasan langsung dengan Pulau Kalimantan Indonesia, tepatnya Sabah dan Sarawak. Atas dasar tersebut, Malaysia dan Indonesia menjadi dua negara yang memiliki dampak dari perubahan iklim yang identik sama akibat letak geografisnya yang berdekatan. Tidak sampai disitu,

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> “Indigenous Group of Dayak Iban Sungai Utik Longhouse: Republic of Indonesia” (Equator Initiative, n.d.), <https://www.equatorinitiative.org/wp-content/uploads/2019/07/Sungai-Utik-Case-Study-English-FNL.pdf>.

seluruh aktivitas Indonesia yang berkaitan dengan perubahan iklim, terutama pada Pulau Kalimantan dapat mempengaruhi sedikit banyak kestabilan Malaysia.

Penulis melihat Suku Dayak Iban yang berada pada pelataran Sungai Utik di Kalimantan Barat sebagai objek penelitian dari salah satu masyarakat adat dimana dinilai telah memberikan kontribusi besar terhadap pencegahan perubahan iklim. Faktanya, masyarakat Suku Dayak Iban telah mempertahankan hubungan kuatnya dengan alam di tengah tekanan berbagai perusahaan penebangan dan kelapa sawit yang berusaha mengambil alih bagian dari total 10.087 hektar hutan pada Kabupaten Kapuas Hulu. Pasalnya, hutan hujan dapat dikatakan sebagai rumah bagi berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang menjadi manfaat kehidupan bagi manusia — makanan, air, kayu, pengaturan iklim, pengendali banjir, penjaga kualitas air, sarana rekreasi, spiritual, dsb. Mereka sadar terhadap perlunya keterlibatan dari sebuah aksi sebagai bentuk pemberian solusi berupa adaptasi dan mitigasi dari perubahan iklim. Hal ini disebabkan masyarakat adat sendiri menganggap bahwa manusia merupakan bagian dari alam yang harus dijaga dan dipelihara. Maka dari itu, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa masyarakat adatlah yang membantu pemerintah dalam pelestarian dan penjagaan hutan.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Permasalahan perubahan iklim telah menjadi isu global. Pasalnya, dampak yang terjadi atas permasalahan perubahan iklim tidak hanya menjadi ancaman bagi satu negara saja, tetapi seluruh negara di dunia. Atas dasar tersebut, perubahan iklim

dapat dikatakan memiliki potensi untuk merusak perdamaian dunia mengingat dampak yang diberikan berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, maupun politik yang ada. Hanya saja, kesadaran terhadap penanggulangan dari permasalahan perubahan iklim ini masih minim. Masyarakat maupun pemerintah dalam hal ini tidak melihat adanya urgensi atas permasalahan tersebut. Oleh karena itu, masih perlu adanya terobosan dari salah satu pihak untuk memperlihatkan kepada masyarakat terhadap pentingnya permasalahan ini. Pasalnya, dampak yang terjadi ini kemudian menjadi ancaman pula bagi seluruh bagian masyarakat. Maka dari itu, dalam masalah perubahan iklim sendiri, penanggulangan tidak bisa dilakukan hanya dari satu negara terdampak saja, tetapi juga perlu adanya kontribusi dari negara-negara di sekitarnya pula. Atas dasar tersebut, maka dapat dikatakan bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam yang dimilikinya.

Mengingat letak geografisnya yang bersinggungan, Indonesia dan Malaysia dapat dikatakan perlu untuk menjadi hubungan diplomatik yang baik. Hanya saja, Indonesia dan Malaysia seringkali terlibat dalam suatu sengketa baik adalah aspek kepemilikan wilayah, perbatasan, sampai dengan budaya. Kawasan Sungai Utik merupakan benteng hutan alam terakhir di Kalimantan Barat yang memerlukan pengakuan baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Dayak Iban pun merupakan masyarakat adat yang tinggal dalam kawasan tersebut. Maka dari itu, hubungan diplomatik budaya antara Indonesia dan Malaysia dapat dikatakan berada dalam kondisi krisis sehingga perlu adanya kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Hal tersebut dilakukan mengingat bencana yang terjadi di Indonesia

kemudian memberikan kekhawatiran sendiri terhadap Malaysia. Maka dari itu, perlu tinjauan lebih lanjut mengenai hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia dalam menangani permasalahan perubahan iklim melalui Budaya Dayak Iban Sungai Utik sehingga hal ini tidak menimbulkan sengketa baru. Pasalnya, melihat kepada periode tahun 2018-2019 saja, tercatat bahwa deforestasi di Indonesia masih mencapai 462,46 ribu ha.<sup>14</sup> Angka tersebut tergolong cukup tinggi yang mana masih memungkinkan timbulnya dampak terhadap Indonesia sendiri maupun Malaysia.

Dengan begitu, upaya yang dilakukan oleh masyarakat Suku Dayak Iban Sungai Utik dalam menyelamatkan kelestarian alam pun dapat dikatakan tidak cukup karena perlu adanya keterlibatan dari segala aspek. Ketua AMAN Kalimantan Barat, Sujarni Alloy pun mengatakan bahwa dalam hal ini, masyarakat Suku Dayak Iban Sungai Utik masih belum mendapat dukungan dalam aspek hak. Hal tersebut dilihat dari bagaimana apa yang mereka selama ini upayakan — kelestarian alam — kemudian dirampas atas dasar administrasi negara tanpa adanya konsensi dari masyarakat setempat. Sedangkan, hak masyarakat Suku Dayak Iban perlu untuk diperjuangkan mengingat peran mereka yang sangat besar dan dapat dikatakan membantu sampai menutupi minimnya peran pemerintah dalam kelestarian alam. Minimnya peran pemerintah tersebut dapat dibuktikan dalam perbincangan dengan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas

---

<sup>14</sup> “Laju Deforestasi Indonesia Turun 75,03 %,” PPID, March 3, 2021, <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5848/laju-deforestasi-indonesia-turun-7503>.

Hulu, Hasan. Beliau menyebutkan bahwa, bahkan, mereka pun belum mengetahui secara pasti mengenai batas wilayah dari hutan adat di Sungai Utik. Tidak sampai disitu, pada kawasan Kapuas Hulu sendiri, pemerintah sangat lamban, yaitu kurang lebih 7 (tujuh) tahun dalam mengenali hutan adat. Maka dengan ini, AMAN yang kemudian turun tangan dalam mengamankan hak-hak penting masyarakat adat.

Penetapan Undang-Undang No.41 tahun 1999 yang memasukkan hutan masyarakat ke dalam hutan negara pun ternyata tetap mengabaikan hak dari masyarakat adat itu sendiri.<sup>15</sup> Pasalnya, melalui undang-undang tersebut pun tidak menjadikan hutan masyarakat adat masuk kedalam pengakuan kepemilikan. Bandi atau Apay Janggut selaku kepala rumah panjang Sungai Utik pun mengatakan bahwa meski sebagai pemenang *Equator Prize 2019* yang dikeluarkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP), pengakuan mengenai hutan adat tetap tak kunjung datang untuk masyarakat Dayak Iban Sungai Utik. Beliau sendiri tidak mengerti apa yang jadi penghambat di dalamnya. Menurutnya, pencapaian tersebut bukanlah hal yang luar biasa karena yang mereka harapkan hanya komitmen pemerintah mengenai Surat Keputusan Menteri untuk Pengakuan Hutan Adat Sungai Utik.<sup>16</sup> Kalimantan Barat sendiri memang telah memiliki total 6 (enam) peraturan daerah yaitu yang ditujukan salah satunya untuk Kabupaten Kapuas Hulu

---

<sup>15</sup> Sri Lestari, "Dayak Iban Penjaga Hutan Kapuas Hulu," BBC News Indonesia, June 10, 2010, [https://www.bbc.com/indonesia/laporan\\_khusus/2010/06/100610\\_hutandayak](https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2010/06/100610_hutandayak).

<sup>16</sup> Rahmadi R, "Bagi Masyarakat Iban Sungai Utik, Hutan Adalah Ibu," Mongabay.co.id, June 24, 2019, <https://www.mongabay.co.id/2019/06/24/bagi-masyarakat-iban-sungai-utik-hutan-adalah-ibu/>.

mengenai Pengakuan dan Perlindungan Hutan Adat.<sup>17</sup> Meski demikian, penetapan hukum adat dan hutan adat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) hanya diberikan kepada masyarakat adat Tapang Sambas dan Tapang Kemayu, masyarakat adat Tae dan masyarakat adat Segumun, masyarakat adat Pikul serta masyarakat adat Binua Laman Garoh.<sup>18</sup>

Tidak sampai disitu, Presiden Joko Widodo pada 5 September 2019 silam menerbitkan Surat Keputusan Hutan Adat kepada masyarakat adat yang ada di Kalimantan Barat kecuali Hutan Adat Sungai Utik. Pasalnya, surat keputusan yang dikeluarkan merupakan pengakuan terhadap masyarakat adat dan hutan adat kemudian menjadi perlindungan yang didapat dari negara. Karena bagi masyarakat adat, dengan adanya pengakuan pemerintah, mereka memiliki dasar hukum untuk menjaga dan mengelola hutannya sendiri.<sup>19</sup> Selain itu jika dilihat dari aspek lainnya, akses energi yang minim bagi masyarakat Suku Dayak Iban Sungai Utik seringkali menghambat mereka dalam berburu dan berladang. Tawaran fasilitas listrik yang datang hanya menjadi sarana kepentingan untuk prospek pengambilalihan hutan saja.<sup>20</sup> Seharusnya, pemerintah dan masyarakat saling bekerjasama dalam memerangi perubahan iklim. Namun, menurut Pemimpin Suku Dayak Iban, Apay Bandi Janggut, pemerintah dapat dikatakan belum cakap dalam menjaga hutan

---

<sup>17</sup> Rahmadi R, "Pengakuan Hutan Adat Iban Yang Tak Kunjung Datang," Mongabay.co.id, September 29, 2019, <https://www.mongabay.co.id/2019/09/29/pengakuan-hutan-adat-iban-yang-tak-kunjung-datang/>.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> "Lentera Sui Utik," Enter Nusantara, November 1, 2018, <https://enternusantara.org/lentera-sui-utik/>.

sehingga masyarakat adat yang kemudian melalui tradisinya untuk selalu turun tangan dalam menangani permasalahan tersebut.<sup>21</sup> Karena faktanya, pemeliharaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat adat diharapkan menjadi investasi bagi generasi di masa yang akan datang.

### **1.2.1 Pembatasan Masalah**

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis memberikan fokus mengenai penyelesaian permasalahan perubahan iklim melalui peran masyarakat Dayak Iban Sungai Utik terhadap Malaysia. Isu perubahan iklim dipilih mengingat menurut para ahli dampak yang dimilikinya dapat meningkatkan urgensi terhadap kestabilan negara-negara. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan tidak hanya memiliki pengaruh terhadap satu negara saja, tetapi juga negara-negara di sekitarnya. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan fokus terhadap penyelesaian permasalahan perubahan iklim di Malaysia. Selain keduanya berada dalam hubungan bilateral yang baik, Malaysia dipilih menjadi fokus menimbang letak geografisnya bersentuhan langsung dengan Kapuas Hulu dimana merupakan tempat dimana Budaya Dayak Iban berada. Disamping itu, Budaya Dayak Iban dikenal dengan budayanya kental dengan aspek alam. Pemilihan Sungai Utik pula dipertimbangkan dengan alasan merupakan salah satu kawasan di Kalimantan Barat Indonesia yang terletak berdampingan dengan hutan dimana membuka kesempatan bagi perusahaan

---

<sup>21</sup> Aseanty Pahlevi, Op. Cit.

konvensional untuk pengambilalihan lahan tersebut. Dalam penulisan ini, penulis memberikan batasan pada rentan waktu jangka penelitian tahun 2015 sampai dengan 2020.

Penelitian ini dimulai pada tahun 2015 pasca Peraturan Daerah Kapuas Hulu No. 20 Tahun 2015 mengenai kabupaten konservasi. Kapuas Hulu yang merupakan tempat singgah Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik dengan ini sudah dilihat sebagai daerah yang memiliki potensi besar dalam pencegahan perubahan iklim melalui upaya pemanfaatan, perlindungan, dan pengawetan keanekaragaman keanekaragaman hayati.<sup>22</sup> Hanya saja, masih terdapat banyak kejanggalan yang mana harus tetap menginisiasikan peran masyarakat Dayak Iban Sungai Utik itu sendiri. Sejalan dengan hal tersebut, kemudian penelitian ini berakhir pada tahun 2020 dimana ditetapkannya Hutan Adat Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK Nomor: 3238/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL. 1/5/2020, yang mana memberikan pengakuan resmi mengenai pemerintahan dan keamanan, juga kepastian hukum bagi masyarakat dari negara.<sup>23</sup> Dengan itu, masyarakat dapat lebih leluasa untuk berperan dalam menjaga lingkungan dari salah satunya pembangunan berkelanjutan yang mengarah kepada isu perubahan iklim itu sendiri. Melalui pembatasan tempat dan waktu yang telah disebutkan, dengan ini

---

<sup>22</sup> “Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi,” 2015.

<sup>23</sup> Aseanty Pahlevi, Op. Cit.

penulis berharap dapat melakukan penelitian dengan semaksimal juga sedetail mungkin mengenai peran Budaya Dayak Iban Sungai Utik ini dalam menangani permasalahan perubahan iklim.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis telah melihat adanya anomali sehingga menimbulkan pertanyaan penelitian berupa **bagaimana peran Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik dalam menangani permasalahan perubahan iklim terhadap Malaysia?** Pertanyaan penelitian tersebut dijawab berdasarkan fakta relevan dari tinjauan literatur yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis melalui berbagai sumber.

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penyusunan penelitian ini, yaitu menjelaskan peran masyarakat Suku Dayak Iban Sungai Utik dalam mendukung diplomasi budaya Indonesia untuk menangani permasalahan perubahan iklim melalui budaya yang diangkat.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini diharapkan dapat menuai manfaat sebagai berikut:

1. Membantu masyarakat Suku Dayak Iban Sungai Utik dalam memperlihatkan eksistensi dan mencapai haknya melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
2. Memperluas wawasan pembaca dalam permasalahan perubahan iklim melalui aspek sosial-budaya dan gambaran mengenai diplomasi juga *nation branding* yang ada di Indonesia.
3. Memberikan gambaran atau motivasi kepada pembaca sebagai bahan referensi dalam penentuan juga penyusunan suatu penelitian selanjutnya.

#### **1.4 Tinjauan Pustaka**

Dalam sebuah penelitian, tinjauan pustaka atau kajian literatur dilakukan untuk mencari berbagai sumber yang dapat mendukung serta membantu penulis dalam proses penulisan. Maka dari itu, penulis dalam penelitian ini menggunakan 6 (enam) literatur yang dikaji sebagai referensi pendukung.

Eka Nurhanifa, Neneng Konety, dan Raden Affandi dalam yang berjudul ‘Diplomasi Publik Baru Indonesia Terhadap UNESCO Dalam Menjadikan Kawasan Geopark Rinjani-Lombok Sebagai Geopark Global UNESCO’ memperlihatkan kesadaran terhadap adanya urgensi mengenai optimalisasi pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian kawasan, termasuk dalam aspek pemberdayaan manusia. Pasalnya, dalam penanganan isu lingkungan ini diperlukan adanya efisiensi dan efektifitas dari setiap aspek demi keberlangsungan upaya

pengecehan yang dilakukan.<sup>24</sup> Mengingat isu perubahan iklim ini tidak hanya menjadi tanggung jawab domestik saja, dalam upayanya, setiap negara perlu mendukung adanya kerja sama bersama dengan negara-negara lainnya melalui diplomasi. Maka dari itu, melalui konsep diplomasi publik dan environmentalisme Eka Nurhanifa, Neneng Konety, dan Raden Affandi memperlihatkan adanya instrumen baru yang lebih luas, baik dalam aspek aktor maupun cakupan didalamnya. Penciptaan aspek baru dalam hal ini diharapkan dapat menjangkau seluruh permasalahan dari isu-isu lingkungan dalam skala lokal maupun global yang dapat berpotensi mengancam keberlangsungan hidup manusia.

Tidak hanya itu, peran setiap aktor dalam melihat cakupan baru disini pula diharapkan dapat menjadi salah satu konsiderasi bagi pembuat kebijakan demi menghasilkan suatu regulasi bersama yang disepakati secara detail dan menyeluruh.<sup>25</sup> Menurut Kinanti Kusumawardani Taufik, dalam upaya untuk memahami konsep diplomasi lingkungan dalam penanganan isu seperti perubahan iklim, perlu adanya upaya penguatan dari institusi lokal demi mengadaptasi dan menggeneralisasi strategi diplomasi lingkungan global terhadap nasional.<sup>26</sup> Jika dilihat melalui kaca mata realisme, isu perubahan iklim menyebabkan peningkatan kelemahan dan ketidakstabilan suatu negara secara berlipat ganda. Isu lingkungan

---

<sup>24</sup> Eka Nurhanifa, Neneng Konety, and Raden Affandi, "Diplomasi Publik Baru Indonesia Terhadap UNESCO Dalam Menjadikan Kawasan Geopark Rinjani-Lombok Sebagai Geopark Global UNESCO," *Padjajaran Journal of International Relations* 1, no. 3 (November 30, 2019): 240, <https://doi.org/10.24198/padjir.v1i3.26195>.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Kinanti Kusumawardani Taufik, "Indonesia's Environmental Diplomacy under Yudhoyono: A Critical-Institutionalist-Constructivist Analysis," *The Hague Journal of Diplomacy* 12, no. 1 (December 23, 2017): 1-26, <https://doi.org/10.1163/1871191x-12341349>.

seperti perubahan iklim dapat mengancam berbagai dimensi seperti politik, ekonomi, dan juga sosial. Ancaman tersebut dinilai dapat menimbulkan konflik di masa yang akan mendatang sehingga perlu persiapan demi merespon intervensi militer atau kemanusiaan demi mengatasi permasalahan sosial dan politik.

Meski begitu, isu permasalahan iklim tidak selalu dapat diprediksi atau diketahui secara pasti. Pasalnya, permasalahan iklim saat ini merupakan isu global yang memerlukan penanganan bersama. Maka dari itu, dalam hal ini, manusia hanya bisa melakukan berbagai upaya untuk mencegah melalui sebuah kerjasama yang dilakukan antar negara. Dampak yang ditimbulkan terhadap berbagai dimensi pun tidak selalu harus diselesaikan dengan intervensi militer, melainkan melalui sebuah usaha pencegahan demi mencegah adanya dampak keberlanjutan dari sebuah permasalahan iklim.<sup>27</sup> Pada dasarnya, dalam memberikan jembatan terhadap perubahan iklim dan aspek keamanan, negara masih bergantung kepada peran *International Governmental Organizations* (IGO). Respon yang diberikan IGO terhadap isu perubahan iklim dinilai efektif - memberikan kontribusi yang lebih dalam dan luas. Meski IGO dinilai dapat menyelesaikan berbagai masalah dalam keamanan iklim, dalam hal ini mereka masih memiliki batasan dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah terhadap setiap daerah.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Jeffrey Mazo, "Chapter Five: Climate Change and Security," *The Adelphi Papers* 49, no. 409 (September 2009): 119–36, <https://doi.org/10.1080/19445571003755561>.

<sup>28</sup> Lisa M. Dellmuth et al., "Intergovernmental Organizations and Climate Security: Advancing the Research Agenda," *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change* 9, no. 1 (October 13, 2017): e496, <https://doi.org/10.1002/wcc.496>.

Hanya saja, terdapat perbedaan antara kebijakan pemerintah dan juga IGO. Pemerintah bekerja dalam ranah kebijakan luar negeri sedangkan IGO bekerja atas dasar negara dan keamanan manusia. Maka dari itu, nilai efektif dan tidaknya suatu IGO bergantung pula pada cangkupan yang dimilikinya. Maka, IGO masih perlu penelitian dan komparasi lebih dalam di setiap dimensi sehingga hasil yang diberikan lebih dapat melekat kepada masyarakat. Artikel yang dituliskan oleh Emelie Dupuits pula menjelaskan mengenai keterlibatan aktor masyarakat dalam tata kelola lingkungan internasional melalui *Civil Society Organization* (CSO) dan *Non-Governmental Organization* (NGO). Disebutkan bahwa aktor non-negara dalam hal ini memberikan pertanyaan mengenai strategi yang dijalankan, bagaimana menggambarkan norma dan hak dalam ranah global. Tidak hanya itu, aktor non-negara pula juga menjadi instrumen dalam hubungan antara rezim internasional dan sektor kecil dalam ranah domestik mengenai representasi legitimasi.<sup>29</sup>

Meski Taedong Lee menyebutkan bahwa aktor non-negara tidak memiliki kekuatan, sehingga mereka hanya menjadi interpretasi negara dalam sistem dunia. Namun, peran aktor non-negara dalam hal ini memiliki implikasi yang penting demi memahami setiap otoritas lokal dalam pembentukan jaringan yang ditujukan untuk isu-isu global. Pasalnya, variasi dalam aktivitas translokal bergantung lebih banyak kepada atribut suatu daerah. Tidak hanya itu, masyarakat lokal dianggap lebih peduli dalam melihat setiap perubahan dari suatu isu lingkungan secara efektif dan

---

<sup>29</sup> Emelie Dupuits, *Environment, Climate Change and International Relations*, ed. Gustavo Sosa-Nunez and Ed Adkins (Bristol, England: E-International Relations Publishing, 2016), 114–22.

efisien. Hanya saja, otoritas lokal mungkin tidak sepenuhnya mengembangkan organisasi yang diperlukan demi mengatasi isu perubahan iklim sehingga menciptakan tantangan tersendiri. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana kesulitan hadir ditengah pemerintah lokal dan nasional untuk membangun keterhubungan mengenai suatu kebijakan. Atas dasar tersebut, hal ini sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, aktor, dan sektor karena terdapat kompleksitas dari lingkungan pemerintahan yang multi-skala.<sup>30</sup>

Hanya saja, dari beberapa literatur tersebut, terdapat *research gap* atau kekosongan yang penulis temukan dan diisi melalui penelitian ini. Salah satunya adalah belum adanya pembahasan mengenai peran masyarakat adat melalui budaya yang mereka miliki. Bagaimana signifikansi peran mereka dalam menangani isu global, dalam hal ini perubahan iklim. Tidak hanya itu, penelitian-penelitian diatas pula belum menunjukkan bagaimana IGO maupun NGO mampu menjadi jembatan bagi pemerintah dan masyarakat lokal meski pada dasarnya negara masih menjadi pemeran utama. Maka dari itu, penulis menitikberatkan mengenai bagaimana peran Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik dalam membantu penyebaran informasi dan pengetahuan kepada tatanan global yang lebih luas. Isu yang harus melibatkan seluruh tatanan global ini mengharuskan pengembangan kesadaran sebagai langkah pertama. Oleh karena itu, diharapkan adanya kerjasama di antara seluruh aktor terlibat sehingga upaya yang dilakukan dapat berhasil ke arah pencegahan dampak perubahan iklim secara efektif dan efisien. Maka dengan ini keterlibatan budaya

---

<sup>30</sup> Taedong Lee, *Global Cities and Climate Change : The Translocal Relations of Environmental Governance* (New York: Routledge, 2015), 23–40.

diharapkan menjadi instrumen untuk aspek lingkungan dalam diplomasi publik yang dapat memberikan pengaruh kepada seseorang mengenai pentingnya isu lingkungan ini untuk ditangani.

### **1.5 Kerangka Teori**

Ahli lingkungan hubungan internasional menyatakan bahwa perlu adanya perluasan fokus yang melampaui fokus tradisional. Atas dasar tersebut, Teori Hijau hadir dan beranggapan bahwa dengan adanya komunitas lokal yang lebih kecil dari negara maka diharapkan dapat memberikan perlindungan dan perawatan terhadap lingkungan.<sup>31</sup> Teori Hijau meyakini bahwa kestabilan lingkungan hidup dapat membawa dunia semakin berkembang mengikuti arus yang ada. Karena bagaimana pun, alam atau lingkungan akan selalu melekat pada jiwa manusia. Melalui slogan yang berbunyi 'think globally, act locally', Teori Hijau memberikan pendekatan terhadap aspek domestik dan konstruksi politik yang dimulai dari skala terkecil. Menurutnya, permasalahan global hanya dapat berjalan jika didukung dengan seluruh elemen di dunia. Maka dari itu, diperlukan adanya tata kelola global sebagai sebuah tanggapan yang memberikan fokus dalam menangani isu permasalahan lingkungan secara efektif dan efisien. Banyak dari perusahaan transnasional pun yang memberikan inisiatif dalam melihat aspek dari bawah demi menciptakan interaksi antara lokal dengan global.

---

<sup>31</sup> Matthew Paterson, "Theories of International Relations" (Newyork: Palgrave Macmillan, 2013).

Teori selanjutnya yang penulis gunakan dalam mengkaji penelitian ini adalah konsep diplomasi publik. Diplomasi publik hadir dari ilmu Hubungan Internasional dimana merupakan disiplin ilmu yang dinamis. Melalui pembahasannya, studi ini mengkaji mengenai dinamika fenomena internasional sehingga baik kajian, metode, maupun teori didalamnya dapat berubah dengan cepat menyesuaikan dengan perkembangan dari isu internasional itu sendiri. Kata dinamis yang dimaksud dalam Hubungan Internasional menurut Stephen Chan (1984) mengacu kepada pola interaksi antar aktor yang baik tindakan maupun pengaruhnya dapat berdampak bagi aktor lain di luar negaranya. Menurut Joshua Goldstein (1996), ilmu Hubungan Internasional merupakan bagian dari politik internasional dimana adanya hubungan politik antar negara dalam aspek perang, diplomasi, perdagangan, partisipasi dalam organisasi internasional, aliansi, pertukaran budaya, dsb.<sup>32</sup>

Tidak lama setelahnya, aktor non-negara yang dipandang sebagai suatu kekuatan baru mulai ikut mempengaruhi politik internasional di tahun 2000-an. Karen Mingst (2004) dalam hal ini memperlihatkan Hubungan Internasional yang tidak lagi terfokus kepada satu aktor dominan saja — negara. Maka menurut Mingst, studi Hubungan Internasional mengacu kepada interaksi antara berbagai aktor dalam suatu tatanan politik internasional yang mana didalamnya terdapat negara; organisasi internasional dan non-pemerintah; entitas sub-nasional, baik

---

<sup>32</sup> Bob S. Hadiwinata, *Studi Dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, Dan Reflektivis* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 12–14.

birokrasi dan pemerintah lokal; dan individu. Atas dasar tersebut, kehadiran berbagai aktor ini ikut menentukan arah isu perkembangan politik internasional seperti Hak Asasi Manusia (HAM), kesetaraan gender, sampai dengan lingkungan hidup. Melalui pengertian tersebutlah isu Hubungan Internasional tidak lagi mengenai negara atau menekankan kepada *state-centric model*, tetapi juga aktor dan isu-isu lainnya.

Mengingat permasalahan lingkungan hidup saat ini telah menjadi isu global, maka negara bertanggung jawab pula atas permasalahan tersebut. Setiap negara memiliki tujuan atau targetnya masing-masing demi menekan adanya dampak yang berkepanjangan. Hanya saja, isu lingkungan tidak dapat ditangani oleh satu negara saja, tetapi perlu adanya kerjasama antar negara disekitarnya. Maka dari itu, perlu adanya diplomasi antar negara yang diajukan melalui kebijakan luar negeri demi mencapai tujuan tersebut. Memahami lebih dalam mengenai kebijakan luar negeri, dalam arti luas, kebijakan luar negeri merupakan sebuah perpanjangan dari kebijakan dalam negeri mengenai tindakan atau aturan yang mengatur otoritas politik independen dalam ranah internasional dan mencakup aspek diplomasi, militer, maupun ekonomi. Sebagai sebuah negara, kebijakan luar negeri hadir sebagai bentuk representasi negara terhadap negara lain dalam bentuk program yang kemudian dapat menjadi penentu diterima atau tidaknya suatu negara dan berhubungan pula dengan entitas di luar negaranya.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Jean-Frederic Morin and Jonathan Paquin, *Foreign Policy Analysis: A Toolbox* (Palgrave Macmillan, 2018), 3.

Menurut Harold Nicolson, diplomasi sendiri merupakan manajemen dalam Hubungan Internasional yang dilakukan melalui negosiasi. Menurutnya, diplomasi membutuhkan kemampuan untuk menyampaikan ide, nilai, atau kepentingan suatu negara dengan mengirimkan perwakilannya sehingga dapat dikatakan sebagai seni untuk membujuk orang lain. Menurut Sir Ernest Satow, diplomasi pula merupakan sebuah penggunaan kecerdikan atau taktik maupun cara untuk negara berdaulat menjalankan hubungan. Dalam hal ini, diplomasi erat kaitannya dengan tujuan politik luar negeri dan tidak dapat dipisahkan dari perwakilan negara baik pemerintah maupun non pemerintah. Pada dasarnya, menurut Kerr dan Wiseman, praktik diplomasi dilakukan sebagai alat dua atau lebih negara saling berkomunikasi juga merepresentasikan suatu negara dengan negara lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan berlandaskan hukum internasional sehingga diplomasi dengan ini memiliki prosedur, hukum, dan cara yang perlu diperhatikan mengenai tata diplomatik.

Seiring dengan berjalannya waktu, diplomasi saat ini dapat dikatakan kompleks akibat adanya *hyper connectivity*, *adaptivity*, dan *diversity*. Diplomasi mengalami sebuah transisi dimana tidak lagi hanya tentang negara, tetapi terdapat perluasan isu maupun aktor terlibat. Dalam hal ini praktik diplomasi tidak berubah, hanya ada penambahan dari *high politics* kepada *low politics* didukung dengan perkembangan teknologi juga komunikasi yang lebih terbuka. Akibatnya, praktik diplomasi saat ini lebih bervariasi dengan menggunakan media dan aset apapun oleh siapapun. Oleh karena itu, sekarang terdapat istilah publik diplomasi. Menurut Nicholas J. Cull, terdapat lima komponen dari diplomasi publik, salah satunya yaitu

diplomasi budaya dimana merupakan bentuk pemanfaatan budaya yang dimiliki negara, serta bagaimana budaya dapat dimanfaatkan untuk menarik perhatian atau membentuk opini positif pada warna negara lain. Hanya saja, diplomasi budaya harus dilakukan secara menyeluruh dan memiliki makna didalamnya.<sup>34</sup>

Menurut John West, diplomasi pula mencakup bentuk *multistakeholder* yang menekankan bahwa tata kelola yang baik berkaitan dengan jumlah partisipasi berikut dengan akuntabilitasnya. Dalam hal ini, *stakeholder* sendiri merupakan mereka yang memiliki kepentingan dalam membentuk suatu keputusan tertentu, baik secara individu maupun sebagai perwakilan suatu kelompok. Hanya saja, dewasa ini seruan mengenai adanya transparansi dan akuntabilitas berkembang lebih besar sehingga pengawasan publik juga media lebih diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, domain publik internasional diharapkan untuk merangkul berbagai aktor yang memiliki kontribusi penting dalam suatu pengelolaan. Atas dasar tersebut, aktor non-negara dalam hal ini dilihat bahwa mereka memiliki hak untuk ikut berkontribusi dalam proses diplomatik sebagai perwakilan suatu negara. Kontribusi yang dimaksud dengan ini melalui komunikasi, dialog, maupun partisipasi langsung terhadap suatu isu yang sedang dihadapi. Maka dengan ini, diplomasi *multistakeholder* dapat memberikan sarana maupun harapan untuk membangun strategi yang lebih efisien melalui sebuah pendekatan.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Nicholas John Cull and Darlene J Sadler, *Public Diplomacy : Lessons from the Past* (Los Angeles: Figueroa Press, 2009), 12.

<sup>35</sup> John West, "Multistakeholder Diplomacy at the OECD - Diplo Resource," April 19, 2006, <https://www.diplomacy.edu/resource/multistakeholder-diplomacy-at-the-oecd/>.

*Nation branding* sendiri berkaitan pula dengan suatu pemasaran dan seringkali dimanfaatkan atau digunakan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta untuk membujuk pihak terkait demi mengubah gambaran nasional, identitas, perilaku, sikap suatu negara dalam hal positif. Atas dasar tersebut, *nation branding* merupakan cara untuk merepresentasikan diri sendiri demi membentuk reputasi baik dalam negeri maupun luar negeri. *Nation branding* dapat dikatakan sukses jika ada komunikasi yang kuat antara *people to people* dan ketika nilai yang terdapat didalamnya melekat kuat dalam kehidupan masyarakatnya — tidak hanya pada kehidupan pemerintah atau dua arah. Atas dasar tersebut, penelitian ini mencoba untuk menganalisa mengenai bagaimana masyarakat Dayak Iban Sungai Utik dapat menjadi contoh ke dalam ranah internasional. Pasalnya, suatu kebijakan luar negeri tidak dapat terwujud tanpa adanya kerjasama yang dilakukan melalui diplomasi. Tidak hanya terhadap negara lain, sebelum melakukan diplomasi pun Indonesia perlu untuk menyampaikan apa yang menjadi fokusnya terhadap masyarakat domestik dimana dapat berkaitan dengan cara negara bekerja. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melakukan pemeliharaan alam demi mencegah maupun mengurangi ancaman bahaya dari isu lingkungan.

Bersama ini pula penulis berusaha untuk mengkaji berbagai aktor selain pemerintah yang dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Atas dasar tersebut, penulis menjadikan konsep diplomasi budaya sebagai dasar dari penelitian ini untuk melihat adanya signifikansi peran yang diberikan oleh masyarakat Suku Budaya Dayak Iban Sungai Utik dalam menangani perubahan iklim oleh Indonesia

sendiri. Meski dalam kinerjanya, Suku Budaya Dayak Iban Sungai Utik hanya membantu peran pemerintah, bukan menggantikannya. Budaya Dayak Iban Sungai Utik melalui adat istiadatnya telah lama menjadi aset negara dalam menjaga kelestarian hutan. Dengan ini, dalam upayanya mengatasi dampak perubahan iklim melalui kerjasama antar negara, Suku Budaya Dayak Iban Sungai Utik sebagai masyarakat adat dalam hal ini dapat dikatakan telah menjadi kekuatan baru dari negara Indonesia. Teori ini pula melihat berbagai organisasi internasional yang ikut serta dalam upaya penanganan perubahan iklim, seperti AMAN. Tidak sampai disitu, Budaya Dayak Iban Sungai Utik dengan ini dapat menjadi pionir bagi Indonesia untuk mengembangkan *nation branding* miliknya dalam menangani isu perubahan iklim melalui nilai-nilai yang diangkat.

## **1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1.6.1 Metode Penelitian**

Penelitian yang dirancang ini direncanakan menggunakan tipe metode kualitatif atau data yang berbentuk kata, kalimat, atau gambar dengan studi kasus tunggal. Data ini didapatkan melalui kajian literatur maupun interpretasi personal peneliti yang dapat kemudian dikaji kembali mengenai perbandingan data. Penelitian kualitatif dengan ini lebih menekankan kepada pengamatan suatu fenomena dan memberikan analisis terhadap fenomena tersebut. Atas dasar tersebut, data yang telah dikumpulkan, melalui 2 metode kualitatif kemudian melalui prosesnya dianalisis dan dimaknai dengan hasil yang diberikan. Metode kualitatif pula

memberikan fokus elemen terhadap manusia, objek, instansi, dan hubungan diantaranya demi melihat suatu peristiwa.<sup>36</sup> Penulis menggunakan teknik triangulasi dalam proses validasi atau pengecekan dari setidaknya 3 (tiga) sumber yang berbeda demi menguji kebenaran suatu penulisan. Seluruh data diinterpretasikan dalam bentuk naratif mencakup analisis yang menjawab pertanyaan penelitian itu sendiri.

### **1.6.2 Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini menggunakan studi literatur melalui dokumen sekunder, maupun tersier. Maka dari itu, dalam hal ini, penulis memiliki peran untuk mencari literatur demi penyelesaian penelitian. Referensi yang digunakan berasal dari buku, artikel, maupun jurnal yang dapat dikatakan kredibel atau terpercaya seperti pada situs resmi pemerintahan, NGO, IGO, maupun berita faktual sesuai dengan topik yang dikaji.

### **1.7 Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi ini terbagi kedalam beberapa pokok pembahasan yang terdiri dari 4 (empat) bab.

---

<sup>36</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, “Memahami Metode Penelitian Kualitatif,” Kementerian Keuangan, 2019, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>.

Penulisan bab I mengkaji mengenai pendahuluan dimana mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, serta sistematika pembahasan.

Penulisan bab II mengkaji mengenai urgensi pencegahan dampak perubahan iklim serta hubungan antara Indonesia dan Malaysia dalam menangani permasalahan perubahan iklim, berikut dengan hambatannya. Hal ini mencakup dampak yang diterima oleh Malaysia dan Indonesia dengan melihat baik terhadap aspek ekonomi, sosial, maupun politik.

Penulisan bab III menganalisis mengenai bagaimana upaya masyarakat Dayak Iban Sungai Utik menjaga kelestarian alam demi menangani permasalahan perubahan iklim yang didasarkan oleh Teori Hijau. Tidak sampai disitu, pada bab ini pula penulis berusaha untuk mengkaji bagaimana kemudian upaya tersebut dapat hadir dalam ranah internasional dan menjadi sarana Diplomasi Budaya antara Indonesia dan Malaysia.

Penulisan bab IV mengkaji mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah penulis lakukan sebelumnya.